

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi entitas (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Di Indonesia pelaporan pengelolaan keuangan daerah telah banyak mengalami perbaikan sejalan dengan reformasi manajemen keuangan pemerintah, hal ini bertujuan untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Reformasi manajemen keuangan pemerintah ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Dalam perkembangan masyarakat yang maju utamanya di era keterbukaan, teknologi dan informasi ini pemerintah khususnya dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara transparansi.

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas . laporan keuangan yang berkualitas harus sesuai dengan karakteristik kualitatif, informasi keuangan yang dihasilkan sangat penting bagi pemerintah agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang

lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan, andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).²

Pada dasarnya, kegiatan pembukuan keuangan pada kegiatan bermu'amalah telah tercantum dalam Al-Qur'an. Dasar hukum dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah Ayat 282, berikut potongan ayat tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ.....

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (hutang-piutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. ,”³

Dalam ayat diatas terkandung perintah untuk menulis setiap kegiatan transaksi keuangan terutama hutang piutang. Perintah tulis menulis mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi dimana apa yang telah dicatat diserahkan kepada mitranya sebagai bukti telah terjadi transaksi keuangan.

² Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

³ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), hlm. 59

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara terutama pada instansi pemerintah di daerah telah dikeluarkan aturan pelaksanaan salah satunya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005: Pasal 1 Ayat 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.⁴

Saat ini untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah telah menggunakan suatu sistem. Peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah telah sedikit membawa perubahan dalam akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintahan pusat maupun daerah saat ini telah melakukan perubahan tata pembukuan dari sistem pembukuan menjadi sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya.

Dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, tentunya instansi memerlukan teknologi informasi. Dengan aplikasi, khususnya instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dan akurat, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan

⁴ Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005: Pasal 1 Ayat 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

pelaporannya. Aplikasi yang diperlukan yaitu berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.⁵

Sistem informasi keuangan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah dapat memberikan informasi keuangan daerah untuk masyarakat publik. Dengan menerapkan SIPKD, pemerintah dapat menyusun dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lebih cepat dan mengurangi tingkat kesalahan pengetikan jika dilakukan secara manual. SIPKD merupakan salah satu aplikasi yang digunakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dikarenakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dibuat untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi perbedaan persepsi

⁵ Ismi Desintha Putri, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 1

dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan juga sistem pengendalian internal yang lebih baik. Pengendalian internal digunakan untuk mengantisipasi adanya pencurian, penggelapan keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Sistem pengendalian merupakan proses kegiatan yang dilakukan didalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Variabel Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian semakin baik Sistem Pengendalian Intern maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dearah. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dearah. Hal ini berarti

pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang berarti terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.⁶

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Perubahan tata pembukuan instansi pemerintah khususnya di daerah yang sebelumnya dengan sistem pembukuan menjadi sistem akuntansi.
2. Pelaporan pengelolaan sumber daya publik pemerintah daerah yang saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi.
3. Pengendalian internal pemerintah daerah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan memanfaatkan sistem informasi.
4. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

⁶ Yulia Ratna Sari, “Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *JOM FEB*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 13

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah secara bersama-sama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi, pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi, pengendalian internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah intelektual dan pengetahuan tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta sebagai bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Praktis

- a. Bagi institusi, diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi lembaga, dengan adanya penelitian ini diharapkan lembaga mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

- c. Bagi pihak lain khususnya pemerintah, diharapkan pemerintah dapat membantu keseluruhan institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji tentang penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan SIPKD (X1), pemanfaatan teknologi (X2), pengendalian internal (X3), dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tidak ada keterbatasan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung tahun 2019 sebanyak 40 karyawan.

G. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini peneliti memberi penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat. Penegasan istilah dalam penelitian berfungsi

agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penegasan istilah yang besumber dari kamus atau bahan kajian literature yang relevan dengan penelitian.

Penegasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auiditabel.⁷

b. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi informasi adalah semua peralatan, media, teknik, metode yang digunakan dalsm rangka merekam data, mengirim

⁷ Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010, Kementerian Dalam Negeri: Jakarta, hlm. 15

dan menerima data, mengolah data, menyimpan data dan informasi.⁸

c. Pengendalian Internal

Merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Pengendalian intern diharapkan dapat melindungi kekayaan perusahaan yang diakibatkan dari pencurian, penggelapan keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya.⁹

d. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan standard akuntansi keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha. Informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat apabila memenuhi kriteria kualitas informasi keuangan yakni relevan, dapat diuji, dapat dimengerti, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.¹⁰

2. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam peneliiian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji apakah dengan adanya penerapan SIPKD,

⁸ I Cenic Ardana dan Hendro Lukman, "*Sistem Informasi Akuntansi*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 58

⁹ W. wiratna Sujarweni, "*Sistem Kuntansi*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) hlm. 69-70

¹⁰ Lantip Susilowati, "*Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*", (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 4-5

pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tulungagung.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penjelasan didalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi kedalam enam bab. Dimana keenam bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan isi singkat setiap bab, yaitu

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah
- BAB II** Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti Sistem Informasi, pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal, Penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini, kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian dibagian akhir bab.
- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik

pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data.

- BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.
- BAB V Pembahasan, terdiri dari jawaban hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.
- BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.